

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Dari penjelasan pada Bab I sampai dengan Bab III mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum kebijakan akuntansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran I tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
2. Realisasi anggaran atas beban dan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi sudah sangat baik, sehingga penganggaran yang di laksanakan sudah sangat baik dan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi mendefinisikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Definisi tersebut telah sesuai dengan PSAP 12 Paragraf 8 tentang Laporan Operasional.

4. Pengakuan beban pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi dilakukan pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atas rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKP. Pengakuan beban operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi telah sesuai dengan PSAP 12 tentang Laporan Operasional dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran I tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
5. Pengukuran beban operasional pada CaLK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi tidak disajikan secara jelas sehingga tidak dapat ditinjau dengan PSAP 12 tentang Laporan Operasional.
6. Beban operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi menggunakan basis akrual yang disajikan dalam Laporan Operasional. Penyajian lebih lanjut terkait dengan beban pada Laporan Operasional dibahas secara rinci pada CaLK.
7. Definisi dari belanja pada CaLK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi tidak disajikan, hanya kebijakan akuntansi terkait klasifikasi belanja. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi menerangkan klasifikasi belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi belanja operasional pada

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi disajikan menurut jenis belanja. Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

8. Pengakuan belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi dilakukan pada saat terjadinya pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh unit uang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengakuan belanja operasi dilakukan pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pengakuan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi telah sesuai dengan PSAP 02 Paragraf 31 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran I.
9. Pengukuran belanja operasional pada CaLK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi tidak disajikan secara jelas sehingga tidak dapat ditinjau dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
10. Belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi menggunakan basis kas yang disajikan sebagai komponen dari Laporan Realisasi Anggaran dan disajikan menurut klasifikasi ekonomi. Penyajian lebih lanjut terkait dengan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dibahas secara rinci pada CaLK. Penyajian dan pengungkapan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
11. Dalam pelaksanaan praktik hingga penyajian akuntansi beban dan belanja operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi masih menggunakan cara manual, sehingga masih terdapat beberapa

kendala. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan menggunakan aplikasi otomatis berbasis teknologi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang andal dan kompeten sehingga dapat meminimalisasi kesalahan.